

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. N. (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bakhri, S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baridwan, Z. (2010). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPPE.
- Basah, S. (1955). *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2015). *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. (2013). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HS, H. H., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Jaya, N. S. (n.d.). (2010). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Kuffal, H. (2004). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- McLeod, R. (2010). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi, & Nawawi, B. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Purwaningsih, E. (2012). *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Sitanggang, H. M. (2011). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Suhardo, E. S. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Undip Press.
- Suharto. (2004). *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunaryo, S. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (2009). *ak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjitrosoedibio, R., & Subekti. (1971). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja, G. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing The Wolrd Trade Organization (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

UTSA (*Uniform Trade Secret Act*)

JURNAL DAN ARTIKEL

Annisa, R. N., Sulistiyono, A., & Latifah, E. (2018). Urgensi Kontrak Kerja yang Berkeadilan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang. *Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No.4*.

Effendi, Tolib. (2012). Re-Evaluasi Sistem Penuntutan dalam KUHAP. *Jurnal Media Hukum Vol. 19 No.1*.

- Mahila, S. (2010). Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 10 No.3*.
- Putro, G. H., Sukinta, & Baskoro, B. D. (2012). Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Review, Vol.1 No.4*, 6.
- Rahatesa, O. (2017). Peran World Trade Organization (WTO) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan terhadap Ekspor Apel Selandia Baru-Australia Tahun 2007. *JOM FISIP Vol.4 No.2*.
- Safnul, D. (2018). Perlindungan Rahasia Dagang dari Tindakan Persaingan Curang. *Jurnal Warta Edisi: 56*.
- Sembel, N. (2018). Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Lex Privatum Vol. VI No.1*.
- Susilo, A. B., & dkk. (2010). *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)*. Jakarta: BPHN.
- Yusaf A, G. (2019). Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. *Juris-Diction Vol.2 No.3*.

INTERNET

<https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020, pukul 16.55 WIB.

<https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 06.49

WIB.

<https://dgip.go.id/pengenalan-rahasia-dagang>, diakses pada tanggal 21 Februari

2020, pukul 11.00 WIB